

UPAYA MENINGKATKAN KUALITAS PENYERAPAN ANGGARAN SULAWESI SELATAN TAHUN 2023

Dedi Rahmanto^{*1}

¹KPPN Makassar I, Makassar, Indonesia

Article history:

Received: 23 Desember 2023

Revised: 12 Januari 2024

Accepted: 30 Maret 2024

DOI: <http://dx.doi.org/10.33366/ref.v10i2.5512>

E-mail corresponding author :
dedirahmanto@gmail.com

PENERBIT:
UNITRI PRESS
Jl. Telagawarna, Tlogomas-
Malang, 65144, Telp/Fax:
0341-565500

ABSTRACT

Purpose: *This study aims to analyze the quality of budget implementation by work units partnering with KPPN Makassar I in the first semester of 2023, focusing on factors affecting the low level of budget absorption. The method used was a survey utilizing questionnaires, which were distributed to 80 respondents from work units in Makassar City, Maros, and Pangkep. The questionnaire was designed to collect data on aspects of Budget Revision, Disbursement, Work Execution, Administration, Human Resources (HR), and Compliance. Data analysis was performed by evaluating responses to these aspects. The survey results indicate that the quality of budget implementation is at a moderate level, with problems ranging from 40% to 60%. The two main issues identified are Budget Revision and Work Execution. In the context of Budget Revision, the Automatic Adjustment process and frequent revisions of the POK (Work Output Planning) are the primary challenges. Meanwhile, in Work Execution, the biggest challenges are the hindered procurement process and difficulties in carrying out operational spending proportionally. The study's conclusion emphasizes the importance of improving coordination among relevant parties and enhancing planning quality to address these challenges and encouraging efficiency and effectiveness in future budget implementation.*

Keywords: *Budget Implementation, Budget Absorption, Budget Revision, Work Units (Satker); KPPN Makassar I*

PENDAHULUAN

Konstitusi Republik Indonesia, UUD 1945, mengamanatkan pentingnya pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dengan fokus pada alokasi untuk pemerataan pembangunan (Agustina et al., 2021). Tujuannya adalah untuk menurunkan angka pengangguran, meningkatkan efisiensi sumber daya, serta mendukung peningkatan kinerja ekonomi (anggoro, 2018).

Data dari Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pada tahun 2023, alokasi Belanja Negara dialokasikan sebesar Rp3.061,2 triliun. Komposisi belanja ini mencakup Belanja Kementerian/Lembaga (K/L) sebesar Rp1.000,8 triliun (32,7% dari total belanja) dan Belanja Non-K/L sebesar Rp1.245,6 triliun (40,7% dari total belanja), serta Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) sebesar Rp814,7 miliar (26,6% dari total belanja).

APBN memiliki peran sentral dalam perlindungan masyarakat dan pemulihan ekonomi (Bandiyono & Amalia, 2021). Hal ini diungkapkan dalam enam fokus utama kebijakan APBN 2023, yang disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia pada pidato tanggal 16 Agustus 2022. Fokus utama tersebut meliputi penguatan SDM, peningkatan kualitas pendidikan dan sistem kesehatan, serta akselerasi reformasi perlindungan sosial (Allagan et al., 2023).

Dalam konteks Belanja K/L, fokus diarahkan pada peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas belanja; dukungan terhadap reformasi struktural; percepatan penyelesaian infrastruktur strategis; serta dukungan reformasi birokrasi (Nugraha et al., 2023). Penyerapan anggaran harus dilakukan secara proporsional sepanjang tahun untuk memastikan dampak yang optimal (Oktaliza et al., 2020). Namun, pola penyerapan anggaran tahun 2023 masih menunjukkan tren yang sama dengan tahun-tahun sebelumnya, di mana serapan cenderung meningkat di akhir tahun (Maulid et al., 2021). Data Kanwil DJPb Sulsel dalam Tabel 1 menunjukkan bahwa dari total alokasi pemerintah pusat sebesar Rp54,80 triliun hingga triwulan ketiga 2023, baru terserap 66,69%, dengan sisa 33,31% atau Rp18,25 triliun yang harus dibelanjakan di triwulan keempat.

Pola penyerapan ini memerlukan perhatian khusus, terutama terkait dengan sisa pagu untuk belanja barang sebesar Rp4,30 triliun dan belanja modal Rp3,25 triliun. Penyerapan ini melibatkan proses pengadaan langsung dan konstruksi. Sedangkan, belanja pegawai sebesar Rp2,04 triliun diperkirakan akan terealisasi secara bulanan hingga akhir tahun.

Kota Makassar menjadi lokasi utama pengelolaan dana, terutama karena banyak satker dengan wilayah kerja yang luas. Perinciannya dapat dilihat pada tabel yang akan disajikan berikut ini. Kementerian PUPR, Perhubungan, dan Kesehatan memiliki sisa pagu terbesar, menunjukkan peran signifikan yang mereka emban, sebagaimana ditunjukkan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Pagu dan Realisasi DIPA Per Jenis Belanja K/L Lingkup Sulawesi Selatan Periode Triwulan III 2023 (miliar rupiah)

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi s.d. TW III	Sisa Pagu
Belanja Bantuan Sosial	80,30	62,57	17,43
Belanja Barang	10.366,31	6.064,72	4.301,59
Belanja Modal	5.797,29	2.545,23	3.252,06
Belanja Pegawai	8.597,06	6.560,70	2.036,35
Dana Transfer	29.959,94	21.315,12	8.644,82

Grand Total	54.800,92	36.548,36	18.252,26
-------------	-----------	-----------	-----------

Sumber: OM-SPAN DJPB, 2023

Tabel 2. Pagu dan Realisasi DIPA Per Lokasi K/L Lingkup Sulawesi Selatan Periode Triwulan III 2023 (miliar rupiah)

Kota	Pagu	Realisasi s.d. TW III	Sisa Pagu
23 Kab/Kota Non Makassar	30.424,29	28.448,14	1.976,15
Prov Sulsel	7.551,56	6.448,34	1.103,22
Kota Makassar	16.825,07	13.704,99	3.120,08
Grand Total	54.800,92	48.601,47	6.199,45

Sumber: OM-SPAN DJPB, 2023

Tabel 3. Pagu dan Realisasi DIPA Per K/L Lingkup Sulawesi Selatan Periode Triwulan III 2023 (miliar rupiah)

K/L	Pagu	Realisasi s.d. TW III	Sisa Pagu
41 K/L Lainnya	46.265,36	13.740,43	32.524,93
Kementerian Kesehatan	414,07	275,07	139,00
Kementerian PUPR	6.012,61	3.058,58	2.954,03
Kementerian Perhubungan	2.108,88	1.095,60	1.013,29
Grand Total	54.800,92	36.548,36	18.252,55

Sumber: MEBE DITPA DJPB, 2023

Tabel 4. Sisa Pagu Belanja Modal dan Barang 3 K/L Lingkup Sulawesi Selatan Periode Triwulan III 2023 (miliar rupiah)

K/L	Belanja Barang	Belanja Modal
Kementerian Kesehatan	500,94	301,13
Kementerian PUPR	1.150,84	1.800,27
Kementerian Perhubungan	540,67	540,67

Sumber: MEBE DITPA DJPB, 2023

Serapan anggaran yang terkonsentrasi di akhir tahun perlu mendapat perhatian serius mengingat pentingnya alokasi ini untuk pengadaan, pembangunan, dan pemeliharaan infrastruktur, yang merupakan prioritas strategis nasional (Sudarwati et al., 2017). Belanja modal, khususnya, berkontribusi pada pembangunan tanah, gedung, bangunan, jaringan, dan peralatan (Defitri, 2020).

TINJAUAN TEORITIS

Dalam konteks pengelolaan anggaran di Indonesia, PMK No. 195 Tahun 2018 dari Kementerian Keuangan menetapkan Formulasi Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA). IKPA berfungsi untuk mengawasi pencapaian target penyerapan anggaran per triwulan: 15% pada triwulan pertama, 40% pada triwulan kedua, 70% pada triwulan ketiga, dan 90% pada triwulan keempat (Panggarti et al., 2022). Ketidakmampuan satker dalam mencapai target ini menandakan adanya hambatan signifikan dalam proses pelaksanaannya (Hasanah & Sriyani, 2021).

Salah satu isu utama yang ditemukan adalah rendahnya tingkat penyerapan belanja modal di awal tahun, yang telah menjadi perhatian serius pemerintah (Laka et al., 2017). Pemerintah

secara berkelanjutan berusaha mencari solusi atas permasalahan penyerapan anggaran, khususnya belanja barang dan modal (Yunita & Rasmini, 2020). Berdasarkan kegiatan monitoring dan evaluasi, rendahnya tingkat penyerapan ini umumnya disebabkan oleh empat faktor utama: administrasi, perencanaan, pelaksanaan teknis, dan pencairan (Qoriiba et al., 2021).

Pertama, dalam aspek administrasi, hambatan yang dihadapi termasuk keterlambatan penetapan pengelola anggaran di satker dan ketidaksiapan juknis atau juklak oleh eselon I kementerian/lembaga (Rerung et al., 2017).

Kedua, terkait perencanaan anggaran, satker sering mengalami masalah seperti revisi anggaran karena pagu yang tidak memadai dan kesalahan perencanaan (Waninda & Arza, 2019). Revisi yang tertunda, terutama jika harus diselesaikan di tingkat pusat, mengakibatkan penundaan kegiatan belanja modal. Selain itu, rendahnya kualitas perencanaan anggaran sering terjadi karena ketidaksinkronan antara perencanaan anggaran dengan jadwal dan target kegiatan, ukuran kinerja, dan variabel keuangan seperti HPS, SBM, harga dan spesifikasi produk di pasaran, serta cakupan wilayah (Farida et al., 2021).

Ketiga, dalam aspek pelaksanaan teknis dan pencairan, tantangan yang dihadapi lebih variatif, mulai dari persiapan pengadaan atau konstruksi, seperti penggantian pejabat pengelola keuangan di satker, kegagalan tender atau tender berulang, dan keterlambatan penandatanganan kontrak karena dokumentasi yang tidak lengkap (Hambani et al., 2021). Kendala lain termasuk kondisi alam yang tidak mendukung, seperti curah hujan tinggi dan banjir, serta masalah terkait pembebasan dan ganti rugi tanah yang menghambat pencairan anggaran (Qoriiba et al., 2021).

Keempat, dalam proses pengadaan, keterlambatan sering terjadi karena barang/jasa baru tersedia di e-catalog setelah triwulan pertama, fluktuasi harga, kesulitan memenuhi standar nasional, spesifikasi yang tidak memadai, dan kesulitan mencari penyedia jasa untuk barang impor (Haryanto et al., 2023). Ini mengakibatkan pencairan anggaran terhambat sejak awal tahun.

Terakhir, dalam aspek pencairan, salah satu kendala utama adalah ketidakmampuan satker dalam mematuhi batas pengajuan SPM ke KPPN sesuai dengan realisasi serah terima pekerjaan. Keterlambatan pengajuan SPM menyebabkan satker harus mengajukan dispensasi, baik dari Kanwil DJPb maupun Kantor Pusat DJPb di Jakarta, yang pada gilirannya menghambat proses pencairan (Khaidar et al., 2022). Oleh karena itu, sinergi yang baik antara satker, penyedia barang/jasa, dan internal satker/kementerian menjadi sangat penting.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode survei melalui kuesioner untuk mengumpulkan data tentang pelaksanaan anggaran di Semester I tahun 2023. Kuesioner ini didistribusikan oleh Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan kepada satuan kerja (satker) yang merupakan mitra kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Makassar I. Responden dalam penelitian ini berasal dari satker yang berlokasi di Kota Makassar, Maros, dan Pangkep. Tujuan utama dari penggunaan kuesioner ini adalah untuk mengidentifikasi dan memahami berbagai faktor yang berkontribusi terhadap rendahnya tingkat penyerapan anggaran. Sebanyak 80 responden dari mitra kerja KPPN Makassar I memberikan umpan balik melalui kuesioner yang dirancang oleh Kanwil DJPb Provinsi Sulawesi Selatan. Kuesioner ini dirancang untuk mengumpulkan data dan informasi spesifik mengenai pelaksanaan anggaran. Pernyataan dalam kuesioner dibagi menjadi lima aspek

utama, yaitu: Revisi Anggaran, Pencairan, Eksekusi Pekerjaan, Administrasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Kepatuhan. Dalam kuesioner, satker diminta untuk menilai pelaksanaan anggaran dengan menggunakan narasi yang mencerminkan aspek negatif seperti ketidakmampuan, kelemahan, kekurangan, ketidakpatuhan, atau ketidaklengkapan dalam proses pengelolaan anggaran.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil survei yang dilakukan terhadap satker mitra kerja KPPN Makassar I mengungkapkan kualitas pelaksanaan anggaran yang rata-rata mencapai skor 3,260, menandakan kualitas pelaksanaan yang biasa dengan masalah pelaksanaan berkisar antara 40% hingga 60%. Dua masalah teknis utama yang teridentifikasi dan menjadi prioritas adalah Revisi Anggaran dan Eksekusi Pekerjaan.

Revisi Anggaran

Automatic Adjustment (Pencadangan Anggaran): tantangan utama dalam revisi anggaran adalah proses *Automatic Adjustment*, yang diterapkan pada belanja pegawai, barang, dan modal. Berdasarkan tanggapan dari 42 responden, terutama dari satker di K/L 023 PUPR, kebijakan ini memblokir sebagian anggaran, membuat pelaksanaan anggaran menjadi lebih sulit. Kebijakan *Automatic Adjustment* merupakan respons pemerintah terhadap ketidakpastian ekonomi global dan gejala geopolitik, yang memblokir sementara Pagu Belanja K/L.

Revisi POK (Penyusunan Output Kegiatan): sebanyak 36 responden, terutama dari satker di K/L 033 PUPR dan K/L 076 KPU, menunjukkan bahwa seringnya revisi POK yang menjadi kewenangan KPA menjadi kendala. Proses ini berkaitan dengan perencanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa yang rumit, dengan berbagai tahapan yang harus dilalui.

Satker mengalami kesulitan dalam penyesuaian harga satuan di DIPA sesuai dengan harga pasaran. Kondisi ini memaksa mereka untuk melakukan revisi sebelum pembelanjaan. Penyesuaian ini mencakup biaya satuan per item, jenis barang dan jasa, akun, serta aspek administratif lainnya.

Eksekusi Pekerjaan

Tantangan dalam Tahapan Persiapan: dari kuesioner, ditemukan 7 akar masalah utama dalam tahapan persiapan eksekusi pekerjaan. Dua masalah yang paling menonjol adalah proses pengadaan yang menunggu instruksi dari Kementerian/Eselon I dan kebijakan TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri) yang menyulitkan proses pengadaan. Responden dari K/L 033 PUPR dan K/L 076 KPU khususnya mengalami kesulitan dalam proses ini.

Hambatan dalam Tahapan Eksekusi: terdapat 10 akar masalah dalam tahapan eksekusi. Satu masalah yang sangat dominan adalah kesulitan satker dalam melakukan belanja operasional secara proporsional setiap bulan, yang menunjukkan rendahnya kualitas perencanaan. Indikasi ini muncul dari kesulitan dalam menyamakan rencana penarikan dana dengan pelaksanaan kegiatan yang sesungguhnya.

Kesulitan ini juga berakar dari faktor internal seperti pergantian KPA dan pengelola keuangan, serta faktor eksternal seperti kondisi alam dan pandemi. Satker seringkali tidak mampu mempedomani RPD Halaman III DIPA dan mengalami kesulitan dalam melakukan update sesuai dengan perubahan kegiatan atau kondisi.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap beberapa aspek kritis dalam pelaksanaan anggaran oleh satker mitra kerja KPPN Makassar I di Semester I tahun 2023. Berdasarkan hasil survei dan analisis data, penelitian ini menyimpulkan beberapa poin utama:

Pertama, Kualitas Pelaksanaan Anggaran. Secara umum, kualitas pelaksanaan anggaran oleh satker mitra kerja KPPN Makassar I berada pada tingkat biasa, dengan skor rata-rata 3,260. Ini menunjukkan bahwa terdapat masalah pelaksanaan antara 40% hingga 60% dalam pelaksanaan anggaran. Dua masalah utama yang diidentifikasi adalah Revisi Anggaran dan Eksekusi Pekerjaan.

Kedua, Revisi Anggaran. Dua aspek utama yang menjadi kendala dalam revisi anggaran adalah Automatic Adjustment (pencadangan anggaran) dan seringnya revisi POK (Penyusunan Output Kegiatan). Kebijakan Automatic Adjustment, yang merupakan respons terhadap kondisi ekonomi global dan geopolitik, menciptakan blokir anggaran yang menyulitkan pelaksanaan anggaran. Sementara itu, revisi POK yang sering dilakukan menunjukkan adanya tantangan dalam perencanaan kegiatan dan pengadaan barang/jasa.

Ketiga, Eksekusi Pekerjaan. Dalam tahapan persiapan, proses pengadaan yang menunggu instruksi dari Kementerian/Eselon I dan kebijakan TKDN menjadi dua hambatan utama. Dalam tahapan eksekusi, kesulitan utama adalah melakukan belanja operasional secara proporsional setiap bulan, yang mencerminkan rendahnya kualitas perencanaan.

Keempat, Tantangan dan Solusi. Penelitian ini mengidentifikasi berbagai tantangan dalam pelaksanaan anggaran yang berkaitan dengan aspek administrasi, perencanaan, teknis pelaksanaan, dan pencairan. Solusi atas tantangan ini memerlukan peningkatan koordinasi antara satker, penyedia barang/jasa, dan internal satker/kementerian. Selain itu, peningkatan kualitas perencanaan dan adaptasi terhadap kondisi yang berubah secara dinamis juga penting.

Penelitian ini memberikan wawasan mengenai dinamika pelaksanaan anggaran di satker mitra kerja KPPN Makassar I. Temuan ini diharapkan dapat membantu dalam merumuskan strategi dan kebijakan yang lebih efektif untuk peningkatan efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan anggaran di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Jurnal dan lainnya

- Agustina, T. A., Muchtolifah, M., & Sishadiyati, S. (2021). Analisis Pengaruh Dana Desa, Alokasi Dana Desa Dan Pendapatan Asli Desa Terhadap Jumlah Penduduk Miskin Desa Di Kabupaten Tuban. *Al-Kharaj Jurnal Ekonomi Keuangan & Bisnis Syariah*. <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i2.606>
- Allagan, H. Br., Suharto, S., & Yogopriyatno, J. (2023). Analisis Implementasi Sewa Barang Milik Negara Dalam Peningkatan Pendapatan Negara Bukan Pajak. *Pesirah Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.47753/pjap.v3i2.46>
- anggoro, cahyo. (2018). Kewenangan Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Atas Badan Usaha Milik Negara. *Varia Justicia*. <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v14i1.2044>
- Bandiyono, A., & Amalia, P. (2021). The Effect of State Budget Ratification and Expenditure on the Indonesian Capital Market: An Empirical Study on the LQ 45 Index Shares. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*. <https://doi.org/10.26905/jkdp.v25i2.5134>
- Defitri, S. Y. (2020). Pengaruh Belanja Modal Dan Belanja Pegawai Terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. *Fokus Bisnis Media Pengkajian Manajemen Dan Akuntansi*. <https://doi.org/10.32639/fokusbisnis.v19i2.476>

- Farida, N., Suman, A., & Sakti, R. K. (2021). Fiscal Decentralization, Economic Growth and Regional Development Inequality in Eastern Indonesia. *Journal of Indonesian Applied Economics*. <https://doi.org/10.21776/ub.jiae.009.02.1>
- Hambani, S., Warizal, W., Kusuma, I. C., & Ramadianti, R. (2021). Analisis Faktor Yang Berpengaruh Terhadap Pencegahan Fraud Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa (Persepsi Pegawai Dinas Pemerintah Kota Bogor). *Jurnal Akunida*. <https://doi.org/10.30997/jakd.v6i2.3569>
- Haryanto, H., Novika, O. D., Kawedar, W., & Rahardjo, S. N. (2023). Characteristics and Disclosure of Local Government Financial Statements. *Jurnal Akuntansi Aktual*. <https://doi.org/10.17977/um004v10i12023p010>
- Hasanah, N., & Sriyani, S. (2021). Implementasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi Di Masa Pandemi Covid-19 Pada KPPN Palembang. *Journal Publicuho*. <https://doi.org/10.35817/jpu.v4i3.20116>
- Khaidar, A., Afandi, A., & Jaswadi, J. (2022). Design of an Integrated Information System for Regional Property in Indonesia Probolinggo City Government. *Journal of Applied Business Taxation and Economics Research*. <https://doi.org/10.54408/jabter.v2i1.112>
- Laka, E. I., Sukartha, I. M., & Wirama, D. G. (2017). Pengaruh Kompetensi Dan Motivasi Pada Penyerapan Anggaran Belanja Modal Dengan Komitmen Organisasi Pejabat Pengelola Keuangan Sebagai Variabel Pemoderasi. *E-Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*. <https://doi.org/10.24843/eeb.2017.v06.i12.p05>
- Maulid, L. C., Bawono, I. R., & Sudibyo, Y. A. (2021). The Effect of Government Expenditure on Economic Growth in Indonesia. *Ekulilibrium Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Ekonomi*. <https://doi.org/10.24269/ekulilibrium.v16i1.3172>
- Nugraha, A. L., Hakim, S. A., Jubaedah, D., Julian, A., & Athoillah, M. A. (2023). Islamic Economic Literacy: A Paradigma Economic Thought in Indonesia. *Journal of Islamic Economics and Philanthropy*. <https://doi.org/10.21111/jiep.v6i1.9279>
- Oktaliza, Y., Ahyaruddin, M., & Putri, A. M. (2020). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Provinsi Riau. *Muhammadiyah Riau Accounting and Business Journal*. <https://doi.org/10.37859/mrabj.v1i2.1918>
- Panggarti, U., Zumaeroh, Z., Purnomo, S. D., Retnowati, D., & Adhitya, B. (2022). Studi Komparatif Ketimpangan Antar Pulau Di Indonesia. *Forum Ekonomi*. <https://doi.org/10.30872/jfor.v24i2.10988>
- Qoriiba, F., Aswar, K., & Ermawati, E. (2021). Antecedents of Regional Financial Independence: A Moderating Effect of Capital Expenditure at Local Government Level in Indonesia. *Journal of Economics and Behavioral Studies*. [https://doi.org/10.22610/jeps.v13i4\(j\).3199](https://doi.org/10.22610/jeps.v13i4(j).3199)
- Rerung, E. D., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penyerapan Anggaran Belanja Pemerintah Daerah: Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17947>
- Sudarwati, N., Karamoy, H., & Pontoh, W. (2017). Identifikasi Faktor-Faktor Penumpukan Realisasi Anggaran Belanja Di Akhir Tahun (Studi Kasus Pada Balai Penelitian Dan Pengembangan Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Manado). *Jurnal Riset kuntansi Dan Auditing Goodwill*. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i1.15332>
- Waninda, W., & Arza, F. I. (2019). Relevansi Informasi Laporan Keuangan Accrual Basis: Kemampuan Rasio Keuangan Dalam Memprediksi Status Financial Distress Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Se- Indonesia Periode 2015-2017. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*. <https://doi.org/10.24036/jea.v1i2.111>

Yunita, P. V., & Rasmini, N. K. (2020). Partisipasi Masyarakat Memoderasi Pengaruh PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Pada Kinerja Keuangan. *E-Jurnal Akuntansi*. <https://doi.org/10.24843/eja.2020.v30.i04.p20>